

AKSELERASI PENINGKATAN MUTU PROSES PENDIDIKAN DI NUSA TENGGARA BARAT BERBASIS BUDAYA LOKAL MENUJU MASYARAKAT LITERASI

Asmadi

Karyasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia
Pascasarjana Universitas Mataram

Abstrak

Masalah logis yang dikaji dalam tulisan ini adalah fakta munculnya berbagai persoalan pendidikan khususnya mutu proses pendidikan pada masyarakat NTB. Satu sisi dari tahun ke tahun, meski mengalami peningkatan namun masih berada pada urutan bawah dibanding seluruh IPM provinsi-provinsi lain di Indonesia yaitu berada di urutan 31 atau 32 dari 33 provinsi. Padahal dari sisi yang lain, masyarakat NTB tersimpan potensi keunggulan lokal yang dapat dimaksimalkan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengapa pada masyarakat yang memiliki potensi keunggulan lokal/sumber daya manusia tetapi masih rendah mutu pendidikannya? Teori yang digunakan dalam membedah fenomena mutu proses pendidikan ini yaitu teori *Human Capital*, *Social Capital* dan *Cultural Capital*. Berdasarkan temuan kajian ini, tingkat literasi masyarakat NTB masih relatif rendah terutama kemampuan baca tulis dan masih minimnya penerapan proses pembelajaran yang mengarahkan masyarakat pada keterampilan hidup dengan memanfaatkan budaya, potensi atau keunggulan lokal yang menjadi kesenangan masyarakat tersebut.

Kata Kunci: *Proses Pendidikan, Budaya Lokal, Masyarakat, Literasi*

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat memutus rantai kemiskinan yang selama ini menjadi permasalahan pemerintah. Melalui pendidikan yang memadai, masyarakat relatif memiliki banyak pilihan dalam berbagai kesempatan, mulai dari kesempatan memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan sampai dengan memperoleh kesempatan-kesempatan lainnya. Ditambah lagi dengan alokasi anggaran sebesar 25 persen dari total APBN oleh pemerintah dengan persetujuan DPR yang menyiratkan bahwa pendidikan merupakan titik sentral atau *starting poin* dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Akan tetapi, dengan jumlah anggaran sebesar 25 persen dari total APBN pun belum dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat NTB khususnya. Padahal dari sisi yang lain masyarakat Indonesia khususnya masyarakat NTB memiliki potensi keunggulan lokal yang dapat dimaksimalkan. Kondisi ini justru akan memunculkan pertanyaan mengapa pada masyarakat yang memiliki potensi budaya, keunggulan lokal/sumber daya manusia tetapi masih rendah mutu pendidikannya?

Untuk itu, masalah logis yang dikaji dalam tulisan ini adalah fakta munculnya berbagai persoalan pendidikan khususnya mutu proses pendidikan pada masyarakat NTB. Satu sisi dari tahun ke tahun, meski mengalami peningkatan namun masih berada pada urutan bawah dibanding seluruh IPM provinsi-provinsi lain di Indonesia yaitu berada di urutan 31 atau 32 dari 33 provinsi. Bahkan sejak pertama kali dipublikasikan oleh BPS rangking IPM-NTB nomor 26 dari 27 provinsi yaitu pada tahun 1996-1999 dengan nilai masing-masing 56,7 dan 54,2. Tahun 2002 menempati urutan 30 dari 30 provinsi dengan nilai 57,8 dan sejak tahun 2005 sampai 2011 selalu di posisi 32 dengan nilai 62,42 (2005), 63,04 (2006), 63,71 (2007), 64,12 (2008), 64,66 (2009) 65,2 (2010), dan terakhir tahun 2011 dengan nilai IPM 66,23.

Selain itu, disadari atau tidak bahwa tingkat literasi masyarakat NTB masih relatif rendah bila dibandingkan dengan hal yang sama di provinsi lainnya di Indonesia. Data tahun 2013 mengemukakan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 66,89. Angka IPM ini masih lebih kecil dari angka rata-rata nasional yaitu sebesar 73,81. Implikasi dari angka-angka tersebut adalah bahwa masyarakat NTB harus lebih giat lagi bekerja agar memperoleh pendapatan yang layak dan dapat hidup secara layak dan sehat serta dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Yasin, 2014).

Dengan demikian, tulisan sederhana ini mencoba membahas fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, di antaranya tingkat literasi masyarakat NTB yang masih relatif rendah terutama pada kemampuan baca tulis dan masih minimnya penerapan proses pembelajaran yang mengarahkan masyarakat pada keterampilan hidup dengan memanfaatkan budaya, potensi atau keunggulan lokal yang menjadi kesenangan masyarakat tersebut.

B. Konsep dan Teori Bergayut

Ikhtiar pendidikan, khususnya melalui proses pembelajaran, guna mengembangkan kemampuan kognitif subjek didik adalah perlunya disadari betul oleh para pendidik bahwa kemampuan intelektual setiap peserta didik harus dipupuk dan dikembangkan agar potensi yang dimiliki setiap individu terwujud sesuai dengan keberbedaan masing-masing (Asrori, 2007: 56). Dalam perkembangannya, pendidikan di Indonesia belum sejajar dengan negara-negara maju di Asia Tenggara, apalagi pada tingkat dunia, ini artinya produk pendidikan Indonesia belum mampu bersaing di pasar bebas. Pada masa lalu proses belajar mengajar selalu berfokus pada guru atau pengajaran dan materi kurang berfokus pada kompetensi pembelajaran siswa. Oleh karena itu, pola pikir pembelajaran perlu diubah dari sekedar memahami konsep dan prinsip keilmuan, menjadi siswa memiliki kemampuan berbuat sesuatu, dengan menggunakan konsep dan prinsip keilmuan yang telah dikuasai (Sagala, 2012: 243).

Pilar pemerataan kesempatan dan perluasan akses merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penciptaan dan peningkatan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara. Pemerataan pendidikan pada hakikatnya adalah setiap orang atau penduduk mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis pendidikan tanpa dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi masyarakat, agama, suku, dan lokasi geografis (Amalia, 2008). Marrifield menyebutkan bahwa semestinya pembelajaran diarahkan sebagai praktek sosial. Praktek sosial mencerminkan bahwa warga belajar berdasarkan kebutuhannya, jika sebagai petani maka dibelajarkan tentang praktek bagaimana bertani dan seterusnya (Faisal, 2009).

Ihwal di atas, pendekatan proses adalah suatu pendekatan pengajaran memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan proses dalam pembelajaran dikenal pula sebagai keterampilan proses, guru menciptakan bentuk kegiatan pengajaran yang bervariasi, agar siswa terlibat dalam berbagai pengalaman. Siswa diminta untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai sendiri suatu kegiatan. Siswa melakukan kegiatan percobaan, pengamatan, pengukuran perhitungan, dan membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri (Sagala, 2012: 74).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, baik proses pendidikan maupun proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri tentunya harus sejalan dengan perkembangan zaman yang dekade ini dinamakan era globalisasi. Salah satu ciri dari era globalisasi adalah arus informasi yang kian cepat dan masif yang tentunya akan berdampak positif dan/atau negatif pada tatanan kehidupan bermasyarakat. Kemajuan di bidang informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia secara menyeluruh dan instan.

Akibatnya, informasi telah mengubah kebiasaan (habit) dan nilai-nilai tradisional yang dimiliki masyarakat. Dengan kata lain, keberadaan informasi yang kian mudah dan arus migrasi manusia yang mengglobal memaksa terjadinya transformasi dan interaksi budaya penduduk dunia seakan-akan tak terbatas lagi sehingga budaya lokal dipengaruhi oleh budaya nasional dan/atau global (Yasin, 2014).

Mencermati pendapat-pendapat ahli di atas, ada 3 teori yang digunakan dalam membedah fenomena mutu proses pendidikan berbasis kebudayaan lokal ini yaitu: *Pertama*, teori *Human Capital* menjelaskan proses di mana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya teori ini maka dapat dilihat bahwa faktor pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Kualitas manusia secara tidak langsung berpengaruh dalam ekonomi. Manusia dituntut agar dapat meningkatkan produktivitasnya. Teori ini dipelopori oleh Schultz (1971). Dalam teori ini disebutkan bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital sebagaimana bentuk kapital-kapital lainnya yang sangat menentukan bagi pertumbuhan produktivitas suatu bangsa (Sukardi, 2009).

Kedua, teori *Social Capital* adalah kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama dalam berbagai komunitas disebut modal sosial. Manusia dituntut untuk dapat berkembang dan menyalurkan keahliannya di dalam suatu komunitas, di mana manusia tersebut dapat merancang suatu tujuan bersama. Teori mengenai kapital sosial yang lebih modern pada perkembangannya diungkapkan oleh Lawang (2004), kekuatan sosial menunjuk pada semua mekanisme yang sudah dan dikembangkan oleh komunitas dalam mempertahankan hidupnya. Pengertian komunitas dapat mengacu pada komunitas mikro, mezo dan makro. Kekuatan-kekuatan sosial sebagai kapital sosial dapat terbatas pada komunitas itu saja yang dilihat sebagai *bounded social capital* atau jika sudah dikaitkan dalam bentuk jaringan dengan kapital sosial meso dan makro dapat disebut sebagai *bridging social capital*. Kalau satuan pengamatan dan analisisnya adalah meso sebagai *bounded* maka yang makro adalah *bridging* (lihat Nuryadin, 2010).

Ketiga, teori *Cultural Capital* yaitu keterampilan antar perseorangan yang informal, kebiasaan, gaya bahasa atau pengucapan, kepercayaan, rasa, dan gaya kehidupan merupakan *Cultural Capital*. Manusia yang berpendidikan biasanya juga mempunyai kepribadian yang baik, bagaimana cara memperlakukan orang lain yang biasanya berkaitan dengan tradisinya, dan dapat memposisikan sikap sesuai dengan kondisi. Cara bersikap dinilai manusia dapat menunjukkan suatu kemampuan yang dimiliki dan menyakinkan orang lain untuk percaya. Suatu kebiasaan yang dimiliki dapat menunjukkan kepribadian manusia.

Selaras dengan teori di atas, seharusnya di tingkat lokal hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat menjadi acuan dalam menyebarkan informasi dan mengimplementasikan program-program pembangunan. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, keterbukaan pemerintah pada masyarakat, adanya komitmen dan keinginan yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun, serta adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan akan mendorong percepatan peningkatan mutu pendidikan dan akan terciptanya pembangunan sistem pemerintahan yang baik, di mana akuntabilitas dan transparansi pemerintahan berimbang dengan akses dan kontrol masyarakat terhadap pemerintahan.

Dengan demikian, proses pendidikan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Pendidikan harus dipandang dan diberlakukan sebagai bagian dari masyarakatnya. Kekurangmampuan anak-anak kita dalam bidang matematika dan bidang ilmu pengetahuan, serta tingginya angka buta huruf dewasa (*adult illiteracy rate*) di Indonesia adalah akibat membaca belum menjadi kebutuhan hidup dan belum menjadi budaya bangsa. Oleh sebab itu, membaca harus dijadikan kebutuhan hidup dan budaya bangsa kita (Witono, 2014).

C. Potret Mutu Proses Pendidikan di NTB

Partisipasi sekolah sebagai ukuran kuantitas secara umum dapat menggambarkan mengenai kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan. Besarnya angka partisipasi penduduk menunjukkan semakin membaiknya pelayanan pendidikan sehingga memberikan banyak kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan. Partisipasi sekolah usia 5-24 tahun di provinsi NTB hasil Susenas 2013 secara total mencapai angka sekitar 65,45 persen berbanding 66,44 persen. Sementara itu, level pendidikan SMA ke atas hanya ditamatkan oleh sekitar 22,53 persen penduduk NTB usia 10 tahun dengan komposisi laki-laki sebesar 25,90 persen dan perempuan sebesar 19,44 persen.

Sedangkan untuk kemampuan baca tulis penduduk NTB sudah semakin membaik dengan capaian sekitar 87,19 persen penduduk usia 10 tahun yang dapat membaca dan menulis (Susenas, 2013).

Ironisnya, meski partisipasi sekolah semakin meningkat, pelayanan pendidikan semakin membaik yang ditunjukkan dengan data capaian Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2013 di atas, akan tetapi mengapa urutan IPM NTB masih berada pada urutan bawah dibandingkan seluruh IPM provinsi-provinsi lain di Indonesia kecuali provinsi Papua? Untuk itu, yang menjadi persoalan dalam kajian ini adalah bukan terletak pada partisipasi sekolah sebagai ukuran kuantitas semata, melainkan upaya akselerasi peningkatan mutu proses pendidikan di NTB untuk mengejar ketertinggalanya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB tahun 2012 jumlah buta huruf penduduk berada pada nilai 16,32 atau tetap berada pada posisi nomor dua terendah setelah provinsi Papua. Kemudian pada tahun 2013 jika dipersentasekan buta huruf nasional, provinsi NTB berjumlah 15,33% atau di bawah provinsi Papua yaitu berjumlah 32, 69%. Berikut tabel buta huruf penduduk NTB pada tahun 2012.

Tabel 1. Buta Huruf Penduduk NTB 2012

No.	Kabupaten/Kota di NTB	Jumlah Buta Huruf
1.	Lombok Barat	21,41
2.	Lombok Tengah	25,08
3.	Lombok Timur	16,11
4.	Sumbawa	9,25
5.	Dompu	12,06
6.	Bima	11,89
7.	Sumbawa Barat	7,50
8.	Lombok Utara	23,90
9.	Kota Mataram	7,75
10.	Kota Bima	6,27
Total NTB		16,32

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013

Data pada tabel (1) tersebut menunjukkan secara jelas betapa masih banyaknya jumlah buta huruf di provinsi NTB. Kabupaten Lombok Tengah berada pada posisi tertinggi jumlah buta huruf penduduk yaitu dengan nilai 25,08 dan Kota Bima berada pada posisi terendah jumlah buta huruf penduduk yaitu dengan nilai 6,27. Berdasarkan tilikan kajian ini, ada indikasi yang menjadi salah satu faktor penyebab jumlah buta huruf penduduk adalah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Selain itu, faktor ekonomi masyarakat juga menjadi penyebab jumlah buta huruf penduduk masih tinggi.

Jika dibandingkan dengan persentase buta huruf nasional tahun-tahun sebelumnya, persentase buta huruf nasional tahun 2013 belum mengalami peningkatan secara signifikan. Jadi, persoalan ini tidaklah menjadi suatu yang mengherankan jika persentase buta huruf nasional tahun 2013 provinsi NTB tetap berada pada posisi nomor dua terendah setelah provinsi Papua. Berikut tabel persentase buta huruf nasional tahun 2013.

Tabel 2. Persentase Buta Huruf Nasional Tahun 2013

No.	Provinsi	%
1.	NTB	15,33
2.	Papua	32,69

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013

Berdasarkan tabel (2) di atas, penulis mencoba menjadikan sebuah acuan untuk melakukan akselerasi peningkatan mutu pendidikan di NTB terutama pada kemampuan baca tulis yang dinilai masih minim.

Data di bawah ini menunjukkan persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas dirinci menurut kabupaten/kota dan kemampuan baca tulis di Provinsi NTB tahun 2013.

Tabel 3. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas dirinci menurut kabupaten/kota dan kemampuan baca tulis di Provinsi NTB tahun 2013.

Kabupaten/Kota	Kemampuan Baca Tulis		
	Melek Huruf	Buta Huruf	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	81,94	18,06	100,00
Lombok Tengah	78,94	21,06	100,00
Lombok Timur	88,34	11,66	100,00
Sumbawa	93,04	6,96	100,00
Dompu	90,50	9,50	100,00
Bima	92,16	7,84	100,00
Sumbawa barat	94,04	5,96	100,00
Lombok Utara	80,05	19,95	100,00
Kota Mataram	94,38	5,62	100,00
Kota Bima	96,17	3,83	100,00
Nusa Tenggara Barat	87,19	12,81	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2013

Data tabel (3) di atas, jelas memperlihatkan perbandingan kemampuan baca tulis masyarakat NTB baik yang melek huruf maupun buta huruf dengan jumlah kemampuan baca tulis melek huruf 87,19 dan buta huruf 12,81. Misalnya di Kota Bima, kemampuan baca tulis berada pada posisi tertinggi dengan jumlah melek huruf 96,17 sehingga jumlah buta huruf berada pada posisi terendah yang hanya berjumlah 3,83. Sebaliknya di Kabupaten Lombok Tengah, kemampuan baca tulis berada pada posisi terendah dengan jumlah melek huruf 78,94 sehingga jumlah buta huruf berada pada posisi tertinggi yang berjumlah 21,06.

Selain itu, data berikut memperjelas mutu proses pendidikan di NTB berdasarkan persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas dirinci menurut kabupaten/kota dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi NTB tahun 2013.

Tabel 4. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas dirinci menurut kabupaten/kota dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi NTB tahun 2013.

Kabupaten/Kota	Tidak/ Belum pernah sekolah	Tidak/ Belum tamat SD	SD	SMP	SMU	Diplo ma	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
Lombok Barat	18,37	23,54	26,76	14,96	13,33	0,69	2,35	100,00
Lombok Tengah	17,97	23,58	25,61	15,23	13,68	1,04	2,89	100,00
Lombok Timur	10,22	25,77	28,62	17,55	13,14	1,29	3,40	100,00
Sumbawa	5,02	20,21	32,44	19,74	17,54	1,09	3,97	100,00
Dompu	7,82	20,77	21,52	18,69	23,22	2,61	5,37	100,00
Bima	6,91	26,44	26,18	14,62	21,12	1,83	2,89	100,00
Sumbawa barat	5,25	22,84	29,29	14,41	22,19	1,32	4,69	100,00
Lombok Utara	21,16	26,06	26,11	13,15	11,32	1,15	1,05	100,00
Kota Mataram	6,65	15,58	20,84	16,59	29,64	2,67	8,02	100,00
Kota Bima	4,06	15,54	18,75	16,61	36,12	1,01	7,92	100,00
Nusa Tenggara Barat	11,71	23,00	26,42	16,33	17,39	1,37	3,77	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2013

Tabel (4) di atas, memperlihatkan persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas dirinci menurut kabupaten/kota dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi NTB tahun 2013. Data tersebut jelas akan berpengaruh pada peningkatan mutu proses pendidikan di NTB. Jumlah angka tidak/belum pernah sekolah mencapai 11,71, tidak/belum tamat SD mencapai 23,00, SD mencapai 26,42, SMP mencapai 16,33, SMU mencapai 17,39, Diploma mencapai 1,37 dan Perguruan Tinggi mencapai 3,77.

Sungguh miris, jumlah angka tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat SD mencapai angka tertinggi, berbanding terbalik dengan jumlah angka yang tamat Diploma dan Perguruan Tinggi yang masih kurang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan persoalan ini terjadi antara lain: Minat dan motivasi masyarakat untuk menuntut ilmu yang masih rendah, faktor ekonomi yang masih kurang dan faktor sosial budaya yang memberikan apresiasi kurang baik terhadap pendidikan serta sarana prasarana yang masih kurang mendukung.

Untuk itu, seharusnya upaya yang dilakukan oleh pelaksana pendidikan dalam hal ini pihak sekolah ataupun pemerintah adalah dengan menggunakan pendekatan budaya. Pendidikan dengan memanfaatkan budaya lokal, potensi atau keunggulan lokal tentu akan menjadi kesenangan tersendiri bagi masyarakat tersebut. Di samping itu, pendekatan ini dapat bermanfaat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada di NTB.

D. Pendidikan Berbasis Budaya Lokal Menuju Masyarakat Literasi

Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berdampak pada rendahnya produktivitas, permasalahan sosial yang ada di NTB (Sukardi, 2009). Namun, untuk memahami masyarakat, kita juga perlu meneliti dan menafsirkan kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana mereka menjalani kehidupannya dan perilaku memilih dan menggunakan medianya. Bagaimana pola konsumsi cara memanfaatkan waktu luang singkatnya kita perlu memahami budaya kehidupan mereka sehari-hari (Ibrahim, 2011: 3).

Masyarakat NTB harus prima literasinya. Literasi selama ini masih dimaknai secara terbatas berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis dan berhitung sehingga kita cenderung mengabaikan literasi yang lainnya dalam arti yang lebih luas. Data angka melek huruf kita sebesar 83,68 %. Sesungguhnya literasi berkaitan salah satunya dengan budaya (*culture*) dan nilai-nilai masyarakat secara menyeluruh sehingga pada gilirannya berimplikasi pada dinamika dan tatanan ekonomi dan migrasi manusia (Yasin, 2014).

Berbagai macam definisi dan terminologi berkaitan dengan literasi berasal dari bahasa Inggris *literacy* yang berarti kemampuan untuk membaca dan menulis (Dwiyanto, 2014). Ada juga para ahli mendefinisikan literasi sebagai keupayaan membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majemuk yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian. Suatu bangsa akan maju jika menghargai dan mencintai dan melek informasi (literasi). Melek informasi berarti kita mampu mendapatkan dan memanfaatkan informasi. Informasi hanya mungkin kita peroleh jika kita mempunyai kecerdasan dan kapasitas membaca dan menulis secara simultan. Untuk mendapatkan literasi informasi yang hakiki maka kita harus memulainya dari menumbuhkan minat baca, kemudian kegemaran membaca, dan selanjutnya kita memiliki budaya membaca. Secara umum masyarakat Indonesia khususnya masyarakat lokal NTB budaya tutur lebih dominan dibandingkan budaya menulis.

Data tabel di bawah ini mengilustrasikan bahwa rendahnya kemampuan literasi masyarakat lokal NTB berkaitan erat dengan lamanya sekolah, angka harapan hidup, dan daya beli. Rata-rata lama sekolah anak-anak NTB kurang dari 8 tahun artinya masyarakat kita kebanyakan tamat sekolah dasar (SD) atau bahkan tidak dapat mengenyam pendidikan pertama (SMP).

Tabel 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB

Komponen	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Angka harapan hidup (AHH, tahun)	61,50	61,80	62,11	62,41	62,73
Angka melek huruf (%)	80,13	80,18	81,05	83,24	83,58
Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,70	6,73	6,77	6,97	7,19
<i>Purchasing poer parity</i> (ribuan RP)	633,58	637,98	639,89	642,80	645,72
IPM NTB	64,12	64,66	65,20	66,23	66,89
IPM (rata-rata Indonesia)	71,17	71,76	72,27	72,77	73,29

Sumber: BPS NTB 2014

Tabel di atas (5) menunjukkan bahwa IPM provinsi NTB sejak tahun 2008-2012 masih rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah karena rendahnya minat dan budaya baca tulis masyarakat NTB itu sendiri. Padahal jika dimaksimalkan semua orang mempunyai kapasitas literasi informasi yang maksimal. Supaya masyarakat NTB menjadi masyarakat literasi tentu diperlukan upaya yang tepat dan murah. Pendidikan yang berbasis kebudayaan lokal pada masyarakat NTB tentu bervariasi pada masing-masing etnis (Sasak, Samawa dan Mbojo). Pada masyarakat Sasak dikenal dengan istilah *bakelam*, yaitu kumpul malam secara sukarela di baruga untuk belajar sesuatu. Selain itu, dikenal pula dengan istilah *ngaji* dan *hiziban*, yaitu berkumpul dan berkelompok untuk mengaji dan yasinan. Sedangkan pada etnis Samawa (Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat) dikenal dengan istilah *baguru*, yaitu suatu kegiatan mencari ilmu terutama dilakukan secara informal untuk mendapatkan ilmu dunia dan akherat.

Kearifan lokal dengan memaksimalkan budaya lokal sesungguhnya potensial dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas literasi masyarakat NTB. Hal ini tentu memerlukan upaya yang terorganisir dari berbagai kalangan mulai dari pemerintah, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Selain itu, diperlukan pula penyediaan fasilitas dan arahan tentang materi yang dipelajarinya.

E. Penutup

Demikianlah sekelumit tulisan sederhana yang berusaha merekam fenomena masyarakat NTB mengenai tingkat literasi masyarakat yang masih relatif rendah terutama pada kemampuan baca tulis dan masih kurangnya penerapan proses pembelajaran yang mengarahkan masyarakat pada keterampilan hidup dengan memanfaatkan budaya lokal, potensi atau keunggulan lokal yang menjadi kesenangan masyarakat NTB. Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan.

Daftar Pustaka

- Amalia, E.R. 2008. *Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia*. Diambil dari <http://google.co.id>. Tanggal 12 Juni 2015.
- Asmani, JM. 2012. *Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal*. Yogyakarta: Diva Press.
- Asrori, Mohammad. 2007. *Psikologi Pembelajaran*. Bandung: Wacana Prima.
- BPS Provinsi NTB. 2014. *Survei Sosial Ekonomi Nasional Provinsi NTB Tahun 2013*. Mataram: Maharani.
- Faisal, S. 2009. "Paradigma Baru Pendidikan Keaksaraan: Tawaran Bagi Pengembangan Pendidikan Keaksaraan di Indonesia". (Makalah) disampaikan pada seminar "Bintek keaksaraan" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Tahun 2009.
- Ibrahim, Idi Subandi. 2011. *Kritik Budaya Komunikasi, Budaya, Media dan Gaya Hidup dalam Proses Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Nuryadin, La Ode Taufik. 2010. *"Kapital Sosial"*. Fisip Universitas Indonesia.
- Sagala, Syaiful. 2012. *Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. Bandung: Alfabeta.
- Schultz, T.W. 1971. *Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research*. New York: Free Press.

- Sukardi. 2009. "*Menguak Pengangguran pada Masyarakat Marginal di Provinsi NTB dalam Perspektif Pendidikan*". (Makalah) menjadi salah satu isi tulisan yang diterbitkan dalam Buku Mozaik Problematika Pendidikan Ekonomi. FKIP Universitas Mataram.
- Witono, A. Hari. 2014. "*Membentuk Karakter Pendidikan Berbasis Perpustakaan Menuju Penguatan IPM NTB*". (Makalah) disampaikan pada Seminar Ilmiah Regional IPI-Provinsi NTB, 23 Oktober 2014.
- Yasin, Suhubdy. 2014. "*Perpustakaan dan Transformasi Budaya Lokal Menuju Masyarakat Literasi*". (Makalah) disampaikan pada Seminar Ilmiah Regional IPI-Provinsi NTB, 23 Oktober 2014.